

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah salah satu bagian penting dari hukum positif di Indonesia, disamping juga menjadi salah satu komponen dari hukum positif itu sendiri. Salah satu komponen hukum yang menjadi bagian dari hukum Islam adalah hukum kewarisan. Warisan adalah merupakan sebab pokok dalam memiliki harta, masalah waris merupakan perkara perdata yang mempunyai kompleksitas permasalahan dalam masyarakat. Hal itu dikarenakan menyangkut hukum personal dan berkaitan dengan harta benda seseorang.

Hukum kewarisan pada dasarnya Islam secara keseluruhan. Hukum kewarisan merupakan terjemahan dari *fiqh mawaris* yang berarti peralihan harta dari orang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Pembagian itu lazim disebut dengan *faraidh* artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya¹.

Proses pemindahan harta terlaksana apabila terpenuhi unsur-unsurnya. Adapun unsur-unsurnya adalah : adanya pewaris, harta warisan dan ahli waris.

Pewaris yaitu seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarga yang masih

¹Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), cet. ke-1, h.13

hidup². Sedangkan harta warisan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Ahli waris adalah orang yang berhak atas harta yang ditinggalkan oleh pewaris³.

Hubungan kewarisan antara seseorang dengan orang lain disebabkan oleh dua faktor, yaitu adanya hubungan darah atau kekerabatan dan adanya hubungan perkawinan⁴.

Hubungan kekerabatan ialah orang yang mempunyai hubungan kerabat melalui nasab (sedarah)⁵. Sebab memperoleh hak kewarisan yang paling terkuat adalah hubungan kekerabatan, karena kekerabatan termasuk unsur *causalitas* seseorang yang tidak dapat dihilangkan pada diri seseorang⁶.

Hal ini tidak dapat dibantah, karena anak tersebut keluar dari rahim ibu. Hubungan darah ini bersifat alamiah dan berlaku sejak awal adanya manusia. Dengan berlakunya hubungan kerabat antara seorang anak dengan ibunya, berlaku pula hubungan darah dari orang-orang yang lahir dari ibu yang sama. Artinya bahwa di antara sesama saudara seibu mempunyai hubungan darah, hal ini yang menyebabkan mereka saling berhubungan

²Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Kencana, 2004), cet. ke-1, h.204

³*Ibid*

⁴Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam (Fiqih Mawaris)*, (Pekanbaru: al Alaf Riau, 2008), cet. ke-1, h. 17

⁵Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), cet. ke-2, h. 564

⁶Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. al Maarif, 1975), cet. ke-1, h. 116

kewarisan⁷. Selanjutnya hubungan kekerabatan juga berlaku antara seseorang yang lahir dengan laki-laki yang menyebabkan ia lahir yang disebut dengan ayah.

Hubungan kekerabatan menjadi sebab hubungan kewarisan
 sebagaimana ditegaskan oleh Allah pada QS. al-Ahzab (33) ayat 6:

[illegible]

Artinya: “Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) didalam kitab Allah dari pada orang-orang mukmin”⁸.

Hubungan perkawinan adalah dapat saling waris-mewarisi antara suami istri yang masih dalam ikatan perkawinan⁹. Dengan arti bahwa suami merupakan ahli waris dari istrinya yang telah meninggal begitupun sebaliknya.

Adanya hak kewarisan yang disebabkan oleh perkawinan ditegaskan oleh Allah pada QS. an-Nisa' (4) : ayat 12































⁷Hajar M, *loc.cit*

⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), cet. ke-1, h.416

⁹A. Sukris Samardi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), cet. ke-2, h.27

Sebelum harta warisan dibagikan kepada semua ahli waris terdapat

pelunasan utang dan pelaksanaan wasiat¹¹. Berdasarkan firman Allah SWT

¹¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1993), cet. ke-1,

di atas, setelah dilaksanakannya kewajiban tersebut baru harta warisan bisa dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

Adanya hubungan kewarisan belum menjamin secara pasti hak kewarisan, karena keberadaan hukum tergantung kepada hal lain yaitu bebas dari segala penghalang yang menjadi sebab terhalangnya seseorang menerima harta warisan.

Penghalang kewarisan yang disepakati ulama ada beberapa faktor, yaitu: karena pembunuhan, karena berbeda agama, dan perbudakan¹². berdasarkan dalil nash sahih yang dapat dijadikan hujjah. Tetapi masih terdapat perbedaan tentang pembunuhan yang menjadi penghalang kewarisan. Pendapat yang kuat dikalangan ulama Syafi'i menetapkan semua jenis pembunuhan menjadi penghalang untuk menerima harta warisan¹³. Ulama Hanbali mengatakan bahwa segala macam pembunuhan yang dilakukan tanpa hak menjadi penghalang mewarisi, pembunuhan yang dilakukan secara hak tidak mengakibatkan terhalangnya seorang mewarisi¹⁴. Menurut ulama Hanafiyah pembunuhan yang menghalangi menerima warisan terbagi dua : pembunuhan yang bersanksi qishas dan pembunuhan yang bersanksi kifarah¹⁵. Sedangkan menurut Imam Malik dan pengikutnya

¹² Wahbah al Zuhaili, *Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, (Bairut Libanon : Dar al Fikr, 1989), cet. ke-3, h 362

¹³Hajar M, *op.cit*, h.23

¹⁴*Ibid*, h.24

¹⁵Fathur Rahman,*op.cit*, h.86

mengatakan bahwa pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan adalah pembunuhan yang dilakukan secara sengaja¹⁶.

Jika dihubungkan dengan Kompilasi Hukum Islam, terdapat perbedaan khususnya mengenai penghalang kewarisan, yaitu terdapat pada pasal 173, Pasal tersebut menyebutkan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang di ancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat¹⁷.

Dari pasal ini tampak adanya perbedaan yang cukup mendasar yang dibawa oleh pasal tersebut jika dibandingkan dengan dasar hukum kewarisan yang berasal dari al-Qur'an atau as-Sunnah. Perbedaan tersebut ialah terdapat pada huruf a dan b pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang mencantumkan perilaku fitnah, penganiayaan berat dan mencoba membunuh sebagai alasan terhalangnya hak waris seorang ahli waris. Padahal menurut peraturan hukum waris dalam Islam yang mengambil dasar hukum dari al-Qur'an dan Hadis, ketiga penghalang di atas sebagai penghalang waris tidak terdapat dalam redaksi al-Qur'an maupun hadis dan bahasan fiqh klasik.

¹⁶Hajar M, *op.cit*, h.23

¹⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia , 2009) , cet. ke-2, h.119

Ketiga penghalang yang terdapat dalam KHI juga terlihat bertentangan dengan salah satu unsur kewarisan yaitu pewaris¹⁸.

Dinyatakan pembunuhan sebagai penghalang kewarisan dalam huruf a telah sejalan dengan aturan hukum kewarisan Islam yang bersumber dari hujjah yang sahih, namun dijadikannya percobaan pembunuhan, penganiayaan berat dan fitnah sebagai penghalang mewarisi merupakan hal baru yang terdapat dalam KHI. Bila dicermati ketiga kategori penghalang kewarisan ini, pewaris berarti belum meninggal dunia¹⁹. Sedangkan hakikat berpindahnya harta dari pewaris kepada ahli waris apabila pewaris telah meninggal. Pada percobaan pembunuhan dan penganiayaan pewaris disiksa langsung oleh calon ahli waris, dan terhadap menfitnah pewaris disiksa oleh putusan hakim pengadilan dengan tuduhan palsu calon ahli waris²⁰.

Berdasarkan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam maka penulis tertarik menganalisis pasal tersebut dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“Penghalang Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Analisis Pasal 173)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena latar belakang diatas, maka masalahnya dapat dirumuskan yaitu:

1. Bagaimana realisasi pasal 173 Kompilasi Hukum Islam ?

¹⁸Hajar M, *Dimensi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Pekanbaru : Suska Prees, 2008), cet. ke-1, h.111

¹⁹*Ibid*

²⁰*Ibid*

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pasal 173 Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan pokok masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui realisasi pasal 173 Kompilasi Hukum Islam
- b. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap pasal 173 Kompilasi Hukum Islam

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini bagi penulis sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai sumbangsih pemikiran dari penulis di tempat penulis menuntut ilmu pengetahuan dan kiranya berguna pula dalam menambah literatur bacaan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Sebagai sarana bagi penulis untuk memperkaya ilmu pengetahuan fiqh dan ushul fiqh
- c. Membuka wacana berpikir penulis khususnya, dan para pemerhati hukum Islam pada umumnya, untuk melihat lebih luas tentang perkembangan pemikiran dalam hukum kewarisan, sebagai salah satu bentuk pengembangan faktor penghalang mewarisi dalam Kompilasi Hukum Islam.

- d. Sebagai syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy) pada Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

D. Kerangka Pikir

1. Teori Syahadat

Teori syahadat adalah teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, sebagai konsekuensi logis dari pengucapan syahadatnya itu. Teori ini dirumuskan oleh al-Qur'an. Adapun ayat-ayat yang dimaksud antara lain: Surat ke-1 ayat 5; Surat ke-2 ayat 179; Surat ke-3 ayat 7; Surat ke-4 ayat 13, 14, 49, 59, 63, 69 dan 105; Surat ke-5 ayat 44, 45, 47, 48, 49, 50; Surat ke-24 ayat 51 dan 52.

Teori syahadat ini merupakan lanjutan dari prinsip ketauhidan dan filsafat hukum Islam²¹.

Teori syahadat menganjurkan seseorang untuk patuh terhadap hukum yang dianutnya. Landasan filosofis lahirnya teori ini ialah kesaksian untuk menjadi seorang muslim dengan mengucapkan dua kalimat *syahadah*²².

Teori *syahadah* yang merupakan kelanjutan dari prinsip tauhid ini ialah bersifat umum. Terdapat pula asas-asas secara khusus yang merupakan lanjutan dari prinsip umum dalam setiap bidang-bidang

²¹Jahaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Tasikmalaya: PT. Lathifah Press dengan Fakultas Syari'ah IAILM- Suryalaya, 2009), cet. ke-2, h. 69

²²Jahaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), cet. ke-1, h. 269

hukum Islam. Salah satu diantara bidang hukum tersebut ialah Hukum Kewarisan Islam²³.

Secara keseluruhan, hukum kewarisan Islam wajib dilaksanakan. Kata “*yushikum Allah*” berarti mensyari’atkan atau memerintahkan. Hal yang lebih penting lagi, al-Qur’an (4: 13 dan 14) menyatakan bahwa barang siapa yang mentaati undang-undang Allah, akan dimasukkan ke surga dan kekal di dalamnya. Sebaliknya, orang yang mengingkari atau melanggar akan masuk neraka dan kekal dan kekal didalamnya²⁴.

Begitu juga dengan penghalang kewarisan yang wajib dipatuhi setiap ahli waris melakukan sesuatu yang dapat menghilangkan hak kewarisannya. Karena berasal dari syariat Allah yang wajib dilaksanakan.

2. Teori keadilan

Kata adil merupakan bahasa Indonesia yang berasal dari kata *al-adlu*, hubungannya dengan kewarisan adalah kata tersebut dapat diartikan dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan²⁵. Secara prinsip dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam, artinya laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan hak kewarisan.

²³Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam, op. cit*, h. 10

²⁴*Ibid*, h. 11

²⁵Amir Syarifuddin, *op cit*, h.24

Hal ini secara jelas disebutkan dalam al-Quran surah an-Nisa' ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak mendapatkan warisan, pada ayat 11 12 dan 176 surah an-Nisa secara rinci diterangkan kesamaan kekuatan hak hak menerima warisan antara anak laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu, suami istri dan antara saudara laki-laki dan perempuan.

Adapun jumlah yang diterima terdapat dua bentuk, adakalanya laki-laki mendapatkan hak yang sama dengan perempuan dan adakala laki-laki memperoleh bagian dua kali dari perempuan. Ini karena keadilan tidak hanya ditentukan dengan jumlah penerimaan hak tetapi juga dikaitkan dengan kebutuhan²⁶. Laki-laki memikul kewajiban ganda yaitu untuk dirinya sendiri dan terhadap keluarga termasuk perempuan. Sebagaimana dijelaskan Allah dalam surah an-Nisa ayat 34.

Dalam sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris pada hakikatnya adalah lanjutan dari tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya, karena itulah perbedaan bagian yang diterima masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga. Bagi seorang laki-laki tanggung jawab utamanya adalah istri dan anak-anaknya, ini merupakan kewajiban agama yang harus dipikulnya sebagaimana surat al-Baqarah ayat 233. Sedangkan kewajiban terhadap kerabat lain hanya bersifat tambahan bukanutama.

²⁶Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam, op.cit*, h.15

Selain itu usia tidak menjadi faktor pembeda antara ahli waris dilihat dari kebutuhan sementara memang terkesan tidak adil, namun samanya penerimaan hak kewarisan antara anak kecil dan orang dewasa adalah dilihat dari sisi waktu. Anak kecil mempunyai kebutuhan materi yang lebih lama dibandingkan orang dewasa. Hasilnya bahwa keduanya merasakan manfaat dari harta yang diterima. Inilah keadilan hakiki menurut konsep hukum Islam²⁷.

Harta warisan yang diterima oleh ahli waris pada hakikatnya merupakan kontinuitas tanggung jawab pewaris terhadap ahli waris tersebut, selama terpenuhinya persyaratan hak menerima kewarisan dengan tidak melanggar aturan hukum kewarisan itu sendiri, tidak ada hal-hal yang dapat menghalanginya dari menerima harta warisan secara hukum. Seperti membunuh yang dapat memutuskan hubungan kekerabatan sebagai penyebab adanya hubungan kewarisan, pembunuhan juga merupakan suatu kejahatan dan hak kewarisan merupakan kenikmatan²⁸. Pembunuhan terhadap pewaris adalah mempercepat memperoleh harta warisan sehingga tidak adil bagi pewaris setelah melakukan kemaksiatan terhadap dirinya maka tetap dibalas kenikmatan untuk menerima harta darinya pula²⁹.

3. Teori ahli waris

²⁷*Ibid*, h 16

²⁸*Ibid*, h.24

²⁹Amir Syrifuddin, *op.cit*, h. 210-211

Ahli waris ialah suatu teori yang dirumuskan oleh para ahli hukum Islam untuk orang-orang yang berhak mendapatkan harta warisan dari orang yang telah meninggal dunia. Ahli waris atau disebut juga dengan *warits* dalam istilah fiqh ialah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal³⁰.

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Hubungan kewarisan antara seseorang dengan orang lain disebabkan oleh dua faktor, yaitu adanya hubungan darah atau kekerabatan dan adanya hubungan perkawinan.

Ahli waris hubungan darah ini ditentukan pada saat peristiwa kelahiran, sedangkan ahli waris hubungan perkawinan ditentukan dengan berlangsungnya akad nikah yang sah³¹. Disamping adanya hubungan perkawinan dan kekerabatan ahli waris baru berhak menerima harta warisan secara hukum apabila terpenuhi persyaratannya, di antaranya adalah tidak ada hal yang menghalanginya secara hukum untuk menerima harta warisan³².

4. Teori penghalang kewarisan

Halangan mewarisi adalah suatu tindakan yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk menerima harta warisan dari pewaris

³⁰*Ibid*, h.196

³¹Amir Syarifuddin, *op.cit*, h. 211

³²*Ibid*, h.211

karena adanya sebab dan syarat mewarisi³³. Penghalang kewarisan menjadi suatu permasalahan yang sangat penting karena hal ini terjadi banyak perbedaan mengenai apa dan bagaimana penghalang kewarisan tersebut.

Para ulama' berbeda pendapat mengenai permasalahan penghalang kewarisan. Seperti kalangan Hanafiyah membaginya kepada empat pembagian, yakni: perbudakan, pembunuhan, berbeda agama dan berlainan negara. Kalangan Syafiiyah dan Hanabilah membaginya dalam tiga pembagian, yakni: perbudakan, pembunuhan dan berbeda agama. Sedangkan kalangan Malikiyah membaginya kepada sepuluh pembagian, yakni : berbeda agama, budak, pembunuhan sengaja, li'an, zina, ragu matinya pewaris, hamil, ragu hidupnya anak yang akan dilahirkan.

Penghalang mewarisi yang disepakati ulama ada tiga pembagian:

- a) Perbudakan
- b) Pembunuhan
- c) Berbeda agama³⁴.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini disebut dengan penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif adalah suatu metode penelitian hukum yang

³³Moh.Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), cet. ke-1, h. 75

³⁴Wahbah al Zuhaili, *loc.cit*

menitik beratkan pada studi kepustakaan³⁵. Dalam hal ini penulis memfokuskan untuk menelaah bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penghalang kewarisan yang terdapat dalam literatur fiqh mawaris dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan pendekatan undang-undang (*statuta aproach*) yang teraplikasi dalam Inpres tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam pada buku ketiga pasal 173 tentang penghalang kewarisan. Setelah itu dihubungkan dengan penghalang kewarisan yang terdapat dalam literatur kewarisan dengan hujah-hujjah yang shahih.

3. Sumber data

Sumber data penelitian ini berasal dari data skunder. Data skunder diperoleh melalui penelusuran sumber-sumber hukum, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum skunder, maupun bahan hukum tersier³⁶.

Bahan hukum primer adalah, bahan-bahan hukum yang mengikat³⁷, berupa Kompilasi Hukum Islam, kitab *ahkam al mawaris* (Muhammad Toha Abu al Ula Khalifah). Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer³⁸,

³⁵Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), cet. ke-1, h. 78

³⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), cet. ke-1, h. 13

³⁷*Ibid*

³⁸*Ibid*

berupa: hukum kewarisan Islam/fiqih mawaris (Hajar M, Amir Syarifuddin), Ilmu Waris (Fathur Rahhman). Bahan hukum Tersier bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum Primer dan Sekunder³⁹, seperti kamus bahasa Arab al- munawwir.

4. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan semua buku yang ada hubungannya dengan penelitian, menelaah isi buku dengan berpedoman kepada daftar isi pada setiap buku-buku yang digunakan dalam penelitian dan mengklasifikasikannya sesuai rumusan masalah.

5. Analisa data

Metode yang penulis pakai dalam menganalisa data adalah metode kualitatif, yaitu setelah penulis mengumpulkan data kemudian melakukan analisa dengan cara menghubungkan dengan teori dan bahan bacaan, selanjutnya di ambil kesimpulan sehingga memperoleh gambaran yang utuh terhadap masalah yang akan diteliti.

6. Teknik Penulisan.

Sebagai tindak lanjut dari pengumpulan data maka metode pengumpulan data menjadi signifikan untuk menuju sempurnaannya penelitian ini. Dengan menggunakan tehnik penulisan sebagai berikut:

- a. Metode deskriptif yuridis yaitu suatu sistem penulisan dengan cara mendeskripsikan realitas fenomena sebagaimana adanya yang dipilih dari persepsi subyek. dengan menggunakan cara-cara yang lazim

³⁹*Ibid*

dalam studi ilmu hukum dan mengaitkan dengan norma, asas, dan kaidah yang mengaturnya.

- b. Metode deduktif yaitu metode penulisan yang bertolak dari kaidah yang umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus, dengan mengumpulkan semua pengamatan penulis mengenai teori penghalang kewarisan yang berasal dari hujjah-hujjah yang sah kemudian dihubungkan dengan teori yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 173 dan berakhir pada suatu kesimpulan yang menghasilkan pengetahuan yang baru.

F. SistematikaPenulisan

Rangkaian sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab akan dirinci menjadi beberapa sub-sub yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, yang membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pikir penelitian, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan bab yang berisi tentang kewarisan menurut hukum Islam yang membahas tentang pengertian dan sumber hukum kewarisan, faktor adanya hubungan kewarisan, faktor penghalang kewarisan.

Bab ketiga adalah kompilasi hukum Islam di Indonesia yang membahas tentang latar belakang dan sejarah kompilasi hukum Islam, metode perumusan kompilasi hukum Islam dan hukum kewarisan dalam kompilasi hukum Islam.

Bab keempat adalah membahas tentang realisasi pasal 173 kompilasi hukum Islam dan analisis hukum Islam terhadap pasal 173 kompilasi hukum Islam.

Bab kelima merupakan penutup yang membahas tentang kritik, saran dan lampiran-lampiran.